

## Resume

# MINORITAS MUSLIM DI AUSTRALIA DAN INGGRIS#

Indriana Kartini\*

### *Abstract*

*The war against terrorism has become the main topic and spread all over the world since the bombing of WTC building in September 11<sup>th</sup> 2001. The issue is that rather fighting terrorist as the actor of terrorism, the war is blurred with fighting Moslem people as the most victimized as the actor of terrorism. Moslems in Australia and United Kingdom, two countries that become close supporter of USA in the war against terrorism, has suffered of negative public perception. It is interesting to analyse policy in those two US' close allies. The research that has been conduct compares policy of Australia and Britain after the bombing. Image of Moslem community in those countries is shaped by the role of mass media as the source of opinion. The war against terrorism has negative effect that it is victimizing Moslem community as the source of terror.*

Isu terorisme merebak ke penjuru dunia khususnya pascatragedi pengeboman WTC di New York pada 11 September 2001. Tujuan mendasar dari “perang melawan terorisme” yang dikumandangkan Amerika Serikat menyusul peristiwa 11 September akhirnya menjadi kabur, yakni antara memerangi terorisme atau memerangi Islam. Penggalangan dukungan dari negara-negara lain yang diprakarsai AS untuk melakukan perang melawan terorisme, lebih tampak sebagai penggalangan sikap untuk turut mencurigai setiap kelompok Muslim. Oleh sebab itu, sikap anti-Islam yang diwujudkan melalui teror dan intimidasi terhadap kelompok minoritas Muslim muncul di beberapa negara termasuk Australia dan Inggris, khususnya mereka yang diduga mempunyai keterkaitan dengan jaringan teroris internasional.

### **Hubungan Muslim dan Non-Muslim di Australia: Tataran Masyarakat**

Hubungan Muslim dan non-Muslim di Australia mengalami pasang surut. Hal ini diakibatkan oleh banyak faktor, misalnya soal kesejarahan, perkembangan situasi yang kompleks dengan adanya isu-isu baik nasional maupun internasional, dan generalisasi yang berlebihan atas eksistensi komunitas Muslim di Australia.

Dari sisi sejarah, datangnya Islam di Australia diyakini dibawa oleh pelaut Makassar pemburu tripang pada tahun 1750, kemudian terjalin hubungan dagang dan perkawinan campuran. Fase berikutnya, pemerintah Australia mendatangkan pengendara unta dari Afghanistan, yang awalnya dipakai untuk mengatasi keadaan alam yang sangat sulit. Pada perkembangan berikutnya, mereka diberdayakan untuk membangun jalur telegraf dan jalur kereta yang disebut *Ghan Train*. Fase selanjutnya, banyak berdatangan imigran dari negara-negara Eropa dan Timur Tengah. Imigran dari negara Eropa memang tidak signifikan bagi

---

<sup>#</sup> Penelitian ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari Indriana Kartini (koordinator), Afadlal, Hamdan Basyar, Riza Sihbudi, Sri Nuryanti, Dhuroruddin Mashad.

\* Penulis adalah peneliti pada Bidang Penelitian Politik Internasional P2P LIPI, Jakarta.

perkembangan komunitas Muslim di Australia. Namun demikian, kedatangan imigran dari negara-negara Arab dan Timur Tengah sangat signifikan dalam sejarah perkembangan Islam di Australia.

Beberapa hal yang mempengaruhi hubungan antara masyarakat Muslim dan non-Muslim di Australia, yaitu dilihat dari jumlah kelompok keagamaan (*relative size of groups*), tidak adanya *overlapping* antara agama yang berbeda, tidak adanya ghettoisasi, dan tidak adanya politisasi atas perbedaan yang ada, yang pada dasarnya mempengaruhi pasang surut hubungan antarmasyarakat itu. Dari hal-hal tersebut, suatu kesimpulan dapat ditarik bahwa meskipun hubungan antara Muslim dan non-Muslim terkadang mengalami fluktuasi, namun masih dikatakan wajar, yang artinya tidak mengarah kepada pengucilan permanen atas kelompok Muslim.

Pesatnya perkembangan komunitas Islam di Australia pada gilirannya tidak lagi dianggap sebagai faktor yang turut menggerakkan perekonomian di Australia, tetapi kemudian dilihat sebagai bagian yang “membahayakan” kelangsungan hidup komunitas kulit putih di Australia yang didominasi budaya *Anglo-Saxon*. Sebagai akibatnya, hal ini memunculkan kebijakan yang membatasi perkembangan komunitas Muslim dengan dikeluarkannya kebijakan *White Australia Policy*, 1901.

Kebijakan ini berpengaruh terhadap menyurutnya kedatangan imigran dari Timur Tengah dan negara Arab. Setelah kebijakan tersebut direvisi pada tahun 1958 dan akhirnya dihapus sama sekali pada tahun 1972, barulah komunitas Islam di Australia menggeliat lagi dengan banyaknya imigran dari negara-negara Arab dan Timur Tengah.

Sebagaimana disinggung di atas, hubungan antarmasyarakat mengalami pasang surut, tergantung pada isu-isu yang mewarnai perkembangannya. Hubungan antarmasyarakat pada dasarnya terjalin dengan baik. Selama ini, pemerintah

Australia dan masyarakat Australia menghormati pelaksanaan asas multikultur Australia. Namun demikian, hubungan memburuk manakala ada isu internasional yang merupakan generalisasi berlebihan atas suatu persoalan, atau stigma atas kelompok Muslim Australia yang kemungkinan dipengaruhi oleh opini-opini yang dibangun media massa. Stigma kedekatan Islam dengan terorisme, Arab, dan lain-lain yang menyudutkan umat Islam di Australia, pada beberapa peristiwa telah memunculkan tindakan diskriminatif bahkan kekerasan, seperti ketika dilakukan *sweeping* pada komunitas Muslim Australia pascapledakan Bom WTC dan Bom Bali.

Media massa memegang peran penting dalam pembentukan opini publik khususnya yang berkaitan dengan eksistensi kelompok Muslim. Meskipun dalam perkembangannya kelompok Muslim ini mengorganisasi diri dalam berbagai bentuk organisasi, dari organisasi formal yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan sampai organisasi radikal, diskursus yang berkembang dalam masyarakat Australia khususnya yang berkaitan dengan fundamentalisme atau terorisme tidak harus dihubungkan dengan keberadaan organisasi Islam ini. Sayangnya, media massa terkadang bias dalam pemberitaannya sehingga sikap masyarakat yang tidak berlebihan atas suatu hal diekspos besar-besaran oleh media. Hal ini sering menimbulkan salah persepsi mengenai eksistensi komunitas Muslim di Australia dan keterkaitannya dengan isu-isu terorisme. Dengan semangat multikulturalisme, seharusnya bisa dibangun kondisi yang lebih kondusif bagi munculnya pemahaman yang komprehensif mengenai komunitas Muslim di Australia.

### **Kebijakan Pemerintah Australia terhadap Minoritas Muslim**

Kebijakan pemerintah federal Australia terhadap minoritas Muslim berjalan dalam ruang politik yang dikuasai oleh dua

kekuatan politik, yaitu gerakan konservatif dan gerakan progresif. Kedua kekuatan politik itu, sesuai dengan sistem yang berlaku di Australia, selalu berusaha membangun kebijakan serasi sehingga bentuknya merupakan pelbagai variasi penerapan nilai-nilai liberalisme. Persamaan sikap kedua kekuatan politik yang paling menonjol adalah konsistensi mereka dalam menjalankan prinsip sekularisme dan praktik pemerintahan *Westminster*. Kedua konsistensi ini telah menempatkan komunitas Muslim Australia sebagai objek yang harus mengalami sosialisasi nilai-nilai liberal dan peradaban Barat.

Kedua kekuatan politik yang dalam praktik kenegaraan terwakili oleh Partai Liberal dan Partai Buruh selalu berusaha menegakkan nilai-nilai sekuler dalam masyarakat. Manifestasinya ialah memegang teguh peradaban Barat yang memisahkan kegiatan-kegiatan sosial politik dari kegiatan-kegiatan keagamaan. Peradaban Barat menganggap kegiatan sosial politik masyarakat sebagai urusan masyarakat sendiri. Oleh karena itu, kedua kekuatan politik tersebut akan selalu melihat komunitas Muslim sebagai komunitas yang tidak mengunggulkan identitas keagamaan dalam pergaulan kemasyarakatan. Program multikulturalisme tampak sebagai koleksi budaya dan bukan koleksi cita-cita kelompok sosial beragama. Kelompok sosial Islam dianggap sebagai bagian dari koleksi budaya tersebut.

Kedua kekuatan politik juga sepakat menjaga sistem politik yang merupakan warisan Inggris, di mana parlemen memiliki otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, pemerintah merupakan bagian dari parlemen tersebut. Konsekuensinya, semua undang-undang harus bersumber pada aspirasi masyarakat dan tidak boleh mengambil rujukan keagamaan. Mereka menganggap kedaulatan Tuhan tidak bisa hidup dalam praktik politik di Australia. Mereka juga cenderung

melakukan liberalisasi komunitas Muslim dengan tujuan menanamkan nilai-nilai liberal dan peradaban Barat.

Percaturan kekuatan politik yang melibatkan kedua gerakan tersebut telah melandasi kebijakan pemerintah federal melakukan pengawasan yang amat ketat kepada kelompok-kelompok sosial Islam yang dituduh teroris. Undang-undang antiterorisme menjadi beban psikologis komunitas Muslim karena merasa selalu menjadi sasaran operasi intelijen dan polisi federal. Akan tetapi, percaturan kekuatan politik juga melandasi persamaan hak-hak komunitas Muslim serta mendapatkan jaminan hidup sesuai prinsip *welfare state*. Misalnya, pemerintah memberikan subsidi kepada lembaga-lembaga pendidikan dan kemasyarakatan Islam.

### **Minoritas Muslim di Inggris: Tataran Sosial**

Meski tak ada informasi pasti kapan tepatnya agama Islam masuk ke Inggris, tetapi setidaknya terdapat catatan yang menyebutkan bahwa pada abad ke-10 telah ada Muslim yang menginjakkan kakinya di negeri yang disebut Al Bartun itu. Kaum Muslim kian banyak dijumpai di Inggris, terutama terjadi di era imperialisme dan kolonialisme Inggris yang mencaplok banyak wilayah Timur yang komunitasnya mayoritas Islam, termasuk khususnya dari Asia Selatan. Seiring dengan hadirnya “komunitas baru ini” sejak 1919-an mulai bermunculan *boarding-house* (rumah kontrakan) yang didirikan sekaligus dihuni oleh komunitas Islam.

Berdasar data yang diterbitkan *Minority Rights Group International* pada Agustus 2002 tergambar bahwa komunitas Muslim tersebar. Muslim terbanyak tinggal di London (1 juta), lalu Bradford (82.750), Scotland (60.000), Wales (50.000), Leeds (30.000), Oldham (25.000), Leicester (25.000), Birmingham (15.000) dan Irlandia

Utara (4.000). Dari seluruh komunitas Muslim, sebagian besar berasal dari sub kontinen India, Turki, serta sebagian keturunan Timur Tengah dan atau Afrika.

Generasi awal Muslim Inggris tidak semuanya kaum pendatang. Shaikh Abdullah Quilliam adalah salah satunya. Keislaman muallaf yang intelektual dan aktivis ini diikuti banyak orang, termasuk sejumlah ilmuwan bereputasi. Sebagai intelektual, Quilliam sangat produktif dalam menulis tentang Islam. Bahkan, tulisannya berjudul “The Faith of Islam” diterjemahkan ke dalam 13 bahasa. Tak sedikit komunitas Inggris pada tahun 1880-an tertarik menjadi Islam lantaran terpengaruh tulisan dan aktivitas Quilliam ini. Tahun 1891, Quilliam mendirikan masjid dan akademi yang mengelola bermacam-macam kegiatan seperti sekolah, *literary society*, *oriental library*, museum, serta menerbitkan jurnal *The Crescent* (terbit mingguan) dan *Islamic World* (terbit bulanan).

Salah satu organisasi yang sangat berjasa dalam pengembangan Islam Inggris adalah *Pan-Islamic Society* (PIS) yang didirikan Dr. Abdullah Suharawady, yang berusaha menghilangkan salah persepsi tentang Islam di lingkungan masyarakat non-Muslim. Sebagai upaya memperkokoh PIS, akhir abad ke-19, Dr Leitner mendirikan *Woking Mosque*, menjadi tonggak awal hadirnya sebuah masjid di London. *Woking Mosque* ini punya pengaruh regional, melakukan korespondensi sangat intensif dengan muslim di luar Inggris, seperti Belanda, Norwegia, Swedia, Hungaria, dan lain-lain yang dipublikasikan pula dalam *Islamic Review*.

Dalam konteks kekinian strategi pendidikan dalam mempersiapkan generasi muslim modern dalam konstelasi dunia Barat tetap berlanjut. Sekolah model ini bukan saja berguna untuk membangun kesadaran keberagaman antara Muslim dengan penganut agama lain, tapi juga dengan sesama Muslim lain yang sebagian besar datang sebagai imigran dari banyak negara.

Karena ada “lampu hijau” dari pemerintah, institusi pendidikan Islam berkembang bahkan sampai tingkat perguruan tinggi, seperti *The Muslim College* di London atau *Markfield Institute of Higher Education*, *The Institute of Higher Islamic Daruul Uloom* (Leicester). Bahkan, di lingkungan pendidikan konservatif seperti *Oxford University* telah berdiri *Oxford Centre Islamic Studies* (OCIS).

Dalam konteks ekonomi Muslim, hal ini semula mengalami problem di dunia perbankan dengan sistem konvensional. Setelah melalui lobi bertahun-tahun, akhirnya HSBC mulai Juli 2003 mengadopsi sistem pendanaan Syariah, lalu menyusul *Islamic Bank of Britain* di London (September 2004), dan pada Maret 2005 diikuti *Lyods TSB*, bank terkemuka di Inggris. Memang beberapa kasus perlakuan tidak adil terhadap Muslim masih terjadi, baik dalam hubungan antarindividu, dunia usaha, ataupun seputar isu jilbab di lembaga pendidikan. Namun demikian, problem itu dapat diselesaikan melalui jalur hukum secara relatif adil.

Sebagian besar migran Muslim berasal dari pedesaan asal negaranya, suatu lokasi —yang berbeda dengan perkotaan— yang pengaruh westernisasi dalam ide, norma, gaya, dan cara hidup belum masuk secara intensif dalam kehidupan mereka. Ketika bermigrasi ke Inggris, mereka mengalami sebuah keterkejutan budaya, sebagai akibat menghadapi sebuah komunitas baru yang sangat berbeda. Terkait dengan persoalan ini, mereka setidaknya meliputi tiga kelompok Muslim: **Pertama**, “kelompok fanatik”. Realitas politik internasional yang sangat tidak menguntungkan Islam, adanya politik standar ganda dari kekuatan hegemoni, dan adanya semangat kebangkitan Islam di seluruh dunia ikut mempengaruhi pemikiran sebagian Muslim Inggris ini. **Kedua**, kelompok yang masih mencampurkan ajaran Islam dengan kultur sesuai dengan garis etnisitasnya. Sebagai bagian terbesar dari komunitas Muslim Inggris,

mereka cenderung longgar terhadap sebagian kultur Barat, namun sangat anti pada bagian lain. **Ketiga**, kelompok muslim kebarat-baratan, yang jumlahnya sangat kecil.

Terutama bagi kelompok Muslim fanatik, problematika sosial yang sering kali muncul, antara lain (a) Soal pendidikan gaya Barat (Inggris) yang tak ada aturan apalagi batasan hubungan beda kelamin, dinilai bertentangan dengan nilai Islam dan kultur asal mereka. Realitas ini mendorong mereka berusaha mewujudkan institusi sekolah tersendiri. (b) *Mainstream* media massa serta dunia hiburan menurut parameter mereka dinilai terlalu vulgar, menjadi faktor penyebab penyimpangan tingkah laku generasi muda. (c) Aturan hukum legal formal Inggris belum mampu mengakomodasi syariah dalam kehidupan umat Islam. (d) Mereka terkadang dihadapkan larangan pelaksanaan salat (apalagi Jumat dan hari besar Islam) pada jam-jam kantor, jam sekolah, jam pabrik. (e) Fasilitas-fasilitas umum (seperti pemandian umum) sulit dimanfaatkan kaum muslimah tanpa harus melanggar keyakinan kultural keagamaannya. Realitas-realitas tadi menyebabkan kaum Muslim sebagai warga minoritas keagamaan terbesar tetap merasa diabaikan pemerintah bahkan oleh masyarakatnya.

Di tengah upaya konsolidasi umat ini, komunitas Muslim juga menghadapi problem internal, akibat faksionalisme dalam kehidupan keagamaan, seperti (1) Isu-isu kemurnian ajaran agama, seperti Barelvi (pengaruh Asia Selatan) vs Wahabi (pengaruh Arab Saudi); (2) Isu-isu sosial politik, seperti antara pengikut Jamaah Tabligh yang “a-politis” vs Jamaat Islami dan Ikhwanul Muslimin yang kental dengan politik; (3) Isu regionalisme akibat beda asal negara, asal wilayah dengan latar belakang bahasa, etnis, kultur, dan kebiasaan berbeda. Mereka merasa lebih sreg berhubungan dengan komunitas Muslim yang sama latar belakang asalnya; (4) Ghetto. Komunitas Muslim tinggal mengelompok dalam komunitas

Muslim sendiri, guna mencegah lahirnya generasi Muslim yang asing terhadap Islam.

Persepsi tentang Islam di dunia Barat termasuk Inggris telah terbentuk selama berabad-abad. Meskipun selama waktu itu, telah terjadi suatu proses untuk memahami Islam di dalam komunitas Barat, namun realitas konflik sering kali masih terjadi. Dalam konteks ini, peran berita-berita di banyak media secara krusial terlibat dalam realitas ini, bahkan ikut bertanggung jawab terhadap terbangunnya apa yang disebut “*the elite racism*” di Inggris, di mana Muslim sering kali terkonotasi dengan barbar, ignoran, berpandangan sempit, *semi-citizen*, teroris gila, penganut agama yang sangat tidak toleran. Diskursus media massa Inggris yang secara ideologis bernuansa anti-Muslim, menjadi sangat mengental terutama sejak Revolusi Iran tahun 1979. Sejak saat itu, terutama sejak terungkap dalam banyak berita, istilah fundamentalisme terus disejajarkan dengan Islam, tentu saja dalam pemaknaan negatif.

Sikap media seperti itu makin parah seiring dengan polemik buku *The Satanic Verses* tulisan Salman Rushdi. Demonstrasi dengan membakar buku oleh Muslim sebagai simbolitas keterlukaan hati akibat penghinaan, oleh media diliput dengan komentar-komentar yang lebih merefleksikan penilaian tentang karakter keagamaan yang meletup-letup di kalangan Islam. Sifat tersebut dilabeli sebagai membahayakan peradaban Barat. Fokus komentar lebih terfokus pada isu-isu emosional Muslim, ancaman kematian, fundamentalis abad pertengahan, fanatisme, serta militanisme. Bahkan, istilah-istilah “Mad Mullahs, Iranian terrorist, Mad Dog Gadaffi” yang sering kali mewarnai media ikut menyuburkan terbangunnya *image* negatif bagi komunitas Muslim.<sup>1</sup> Dalam konteks ini suara Muslim

---

<sup>1</sup> Tahir Ababas, “Media Capital and the Representation of South Asian Muslims in the British Press: an Ideological Analysis”, *Institute of Muslim Minority affairs*, 2001, hlm. 254.

tak dapat ditangkap secara “jernih” oleh komunitas Inggris pada umumnya. Mereka tak memiliki kemampuan dan *platform* untuk mengajukan keberatan apalagi menjelaskan tentang berbagai hal yang secara distortif diberitakan media. Problem seperti ini makin akut bagi Muslim Inggris, terutama setelah tragedi WTC 9 September 2001 yang diikuti pula oleh tragedi Bom London, 7 Juli 2005.

### **Kebijakan Pemerintah Inggris terhadap Minoritas Muslim**

Sejak awal, Inggris Raya (*Great Britain*) terdiri dari masyarakat yang berasal dari empat kebangsaan yang berbeda, yakni Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia. Mereka menjadi sebuah negara “multinasional.” Mereka bersatu dalam satu identitas politik, dengan budaya yang berbeda. Multikultural adalah slogan yang dikembangkan oleh Inggris.

Konsep kewarganegaraan Inggris sebagai identitas politik dengan perbedaan berbagai bangsa tersebut, menyebabkan para imigran dari bekas wilayah jajahan Inggris yang datang ke sana diperlakukan dengan baik dan diterima dalam sistem politik yang ada. Mereka diperlakukan sebagaimana bangsa Wales, Irlandia, maupun Skotlandia. Kondisi itu telah menciptakan bangsa Inggris dengan kultur masing-masing. Akan tetapi, ketika ternyata para imigran tersebut banyak berdatangan ke sana maka ada kebijakan yang membatasinya. Hal ini kemudian berkembang pula apa yang disebut dengan sebutan “patrial”. Istilah itu mengacu kepada orang-orang Inggris (British) asli, yaitu yang berasal dari Inggris (England), Wales, Skotlandia, dan Irlandia, serta keturunan mereka. Istilah itu menimbulkan konotasi diskriminasi. Warga yang bukan “patrial” tidak diperlakukan sama dengan warga yang “patrial”.

Walaupun secara formal, Inggris menerapkan kebijakan yang non-diskriminasi, tetapi pada kenyataannya istilah tersebut telah menimbulkan sikap yang

diskriminatif. Dalam kehidupan sehari-hari, para “patrial” memperoleh hak istimewa, sedangkan nonpatrial menjadi warga negara “kelas dua”.

Sikap tersebut juga muncul terhadap para Muslim di Inggris. Mereka yang kebanyakan berasal dari para imigran dianggap nonpatrial yang berarti tidak diutamakan dalam kehidupan di Inggris. Mereka mengalami diskriminasi yang berkaitan dengan pengamalan agama Islam.

Paling tidak dua aturan hukum Inggris mempunyai dampak signifikan terhadap kehidupan Muslim di sana. **Pertama, *the Race Relations Act***. Undang-undang tersebut melarang adanya diskriminasi berdasarkan ras dan etnis, dalam berbagai kegiatan, tetapi hak beragama tidak termasuk dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, Muslim di Inggris tidak mempunyai pijakan hukum untuk mempertahankan haknya sebagai Muslim, bila ada pihak lain yang melarang mereka ketika tengah menjalankan kehidupan keberagamaannya. Misalnya, pada hari Jumat, laki-laki Muslim dilarang untuk melakukan salat Jumat atau Muslimah dilarang mengenakan *hijab* (jilbab).

**Kedua, *the Public Order Act*** yang dibuat pada tahun 1986. Undang-undang ini mencegah adanya dorongan kebencian rasial. Selain itu, *the Crime and Disorder Act* dibuat pada tahun 1998. Undang-undang ini menciptakan kategori baru dalam tindakan rasial yang tidak menyenangkan, termasuk penyerangan, perusakan, dan pelecehan. Akan tetapi, berbagai tindakan kebencian keagamaan yang ditujukan kepada para Muslim, kembali belum tercakup dalam aturan-aturan tersebut. Kondisi itu dapat melahirkan perasaan teralienasi dan terpinggirkan di kalangan Muslim di sana. Akibatnya, mereka tidak dapat melakukan kehidupan secara “normal” dalam bermasyarakat.

Sebenarnya, masyarakat Muslim di Inggris menginginkan pengakuan dan perlakuan yang sama dengan warga negara

lain. Mereka ingin dianggap sebagai bagian masyarakat dari negara tersebut. Hal itu berkaitan dengan hak asasi warga negara yang semestinya diperlakukan sama. Hak asasi itu harus diterapkan kepada siapa pun, tanpa melihat latar belakang, warna kulit, maupun keyakinan yang dianutnya. Praktik keagamaan semestinya dapat dilakukan oleh penganut Yahudi, Kristen, maupun Islam.

Memang, di antara Muslim Inggris ada yang berkiprah dalam dunia politik. Ada dua warga Muslim Inggris yang menjadi anggota parlemen (Majelis Rendah); Ada empat orang Muslim yang menjadi *peers*; Ada satu orang Muslim Inggris yang menjadi anggota Parlemen Eropa. Di tingkat lokal, partisipasi Muslim Inggris mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada pemilihan tahun 1996, 160 Muslim menjadi anggota Dewan Kota (*Councillors*). Pada tahun 2001, jumlah anggota Dewan Kota yang Muslim berjumlah 217 orang. Para anggota Dewan Kota tersebut mewakili daerah-daerah yang penduduk Muslim cukup besar, seperti London, Birmingham, dan Bradford. Keikutsertaan Muslim Inggris dalam kancah politik tersebut diharapkan dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kehidupan Muslim Inggris.

### **Muslim di Australia dan Inggris: Dimensi Internasional**

Kehidupan minoritas Muslim di Australia dan Inggris senantiasa terkait dengan peristiwa internasional. Bahkan, tidak jarang peristiwa kekerasan internasional berimbas terhadap kehidupan Muslim di dua negara tersebut. Manakala terjadi aksi kekerasan internasional yang melibatkan Muslim, maka minoritas Muslim di Australia dan Inggris langsung terkena imbasnya. Misalnya saja pasca-Perang Teluk 1991, di mana Irak menginvasi Kuwait yang berujung pada penyerangan sekutu ke Irak, aksi kekerasan terhadap minoritas Muslim di Australia pun terjadi. Kemudian, aksi

terorisme 11 September 2001, di New York juga menimbulkan aksi kekerasan terhadap Muslim di Australia dan Inggris.

Pasca-11 September, “perang melawan terorisme” menjadi agenda utama kebijakan luar negeri AS. Agenda tersebut juga diadopsi oleh Australia dan Inggris yang merupakan sekutu terdekat AS. Hal ini menciptakan koalisi triangular (baca: AS, Australia, dan Inggris) dengan AS sebagai pemegang tongkat komando. Ketiga negara tersebut juga mengeluarkan produk hukum, yakni UU antiterorisme yang bertujuan memerangi terorisme. Akan tetapi dalam kenyataannya, komunitas Muslim menjadi target utama pelaksanaan UU tersebut. Atas nama perang melawan terorisme, beberapa warga Muslim di Australia dan Inggris ditangkap dengan menggunakan payung hukum tersebut. Hal ini justru menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat Muslim bahwa tanpa bukti yang kuat bisa saja mereka ditangkap dengan dalih memerangi terorisme. Hal ini dapat dikatakan bahwa gerakan antiteror yang dilakukan pemerintah Australia dan Inggris, justru menimbulkan teror terhadap minoritas Muslim.

Oleh karena itu, kebijakan standar ganda yang dilancarkan pemerintah AS, Inggris, dan Australia justru menumbuhkan radikalisme di kalangan Muslim. Laporan dari *Royal Institute of International Affairs* atau dikenal *Chatham House* menyimpulkan bahwa invasi ke Irak oleh AS bersama Inggris dan Australia justru melahirkan perekrutan militan Muslim sekaligus meningkatkan propaganda, perekrutan, dan pengumpulan dana bagi gerakan al-Qaida. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pelaku pengeboman di London adalah para pemuda Muslim berkewarganegaraan Inggris. Sementara di Australia, terdapat pula pemuda Muslim yang berniat melakukan aksi bom bunuh diri di Lebanon pada 2002. Para pemuda tersebut merupakan bagian dari masyarakat Muslim

yang tidak menyetujui kebijakan luar negeri Inggris dan Australia yang agresif terhadap dunia Islam. Hal ini terutama berkenaan dengan keikutsertaan Inggris dan Australia bersama AS dalam serangan ke Afghanistan dan Irak.

Tatkala serangan militer ke Afghanistan diluncurkan, BBC melakukan *polling* pada November 2001 yang hasilnya sekitar 80% Muslim Inggris memandang aksi militer AS dan Inggris tidak dapat dibenarkan. Sementara pada saat perang Irak, sekitar 66% Muslim Inggris menentang aksi militer ke Irak. Sikap Muslim Australia juga menentang keikutsertaan militer Australia dalam serangan ke Afghanistan dan Irak. Menarik untuk dicermati pernyataan Aziza Abdel Halim, Presiden *Muslim Women's National Network Australia*, yang mengungkapkan bahwa banyaknya pemuda Islam yang berpandangan radikal sebenarnya dampak kebijakan luar negeri Australia. Aziza menegaskan bahwa pandangan radikal akan memudar bila pemerintah Australia dan Barat (baca: Inggris dan AS) menarik mundur pasukannya dari Irak maupun Afghanistan sehingga serangan bom ke negara-negara Barat akan berkurang dengan sendirinya. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah Australia dan Inggris mengkaji ulang kebijakan luar negeri terhadap dunia Islam yang justru kontraproduktif.

### **Minoritas Muslim di Australia dan Inggris: Catatan Perbandingan**

Australia dan Inggris merupakan dua negara yang didominasi kaum “kulit putih” yang mengaku menganut sistem demokrasi liberal, yang dalam hal ini kedua negara tersebut sama-sama menerapkan sistem demokrasi parlementer. Australia adalah anggota Persemakmuran yang dipimpin oleh Ratu Inggris. Dengan kata lain, Australia berada “di bawah” kekuasaan Ratu Inggris. Bahkan, jika kita perhatikan bendera Australia terlihat jelas adanya gambar

bendera Inggris di pojok kiri atas. Oleh sebab itulah, hal ini dapat dipahami jika kebijakan luar negeri Australia cenderung “mengekor” pada kebijakan luar negeri Inggris.

Begitu pula dalam hal kebijakan politik Australia terhadap Islam, baik dalam skala makro (yaitu kebijakan luar negeri mereka terhadap Dunia Islam) maupun dalam skala mikro (yaitu kebijakan terhadap kaum minoritas muslim) cenderung mengikuti apa yang dilakukan Inggris. Setidaknya hal ini terlihat jelas dalam hal pandangan mereka atas masalah Irak, Afghanistan, dan terorisme.

Dari aspek historis, Islam masuk ke kedua negara tersebut pada sekitar abad ke-18. Bedanya, jika di Inggris, kaum Muslim didominasi para warga keturunan dari kawasan Asia Selatan (India, Pakistan, dan Bangladesh) yang pada awalnya masuk ke negara ini sebagai pekerja, sedangkan di Australia, sebagian besar kaum Muslim berasal dari kawasan Afghanistan, Turki, dan Timur Tengah, khususnya Lebanon.

Hubungan antar-sesama kelompok Muslim baik di Inggris maupun di Australia, secara umum tidak mengalami permasalahan. Memang suatu kecenderungan pengelompokan atas dasar asal-usul (ras dan etnis) tetap ada, namun ini tidak mengganggu interaksi sosial di kalangan mereka. Di kedua negara ini, sejumlah organisasi kaum muslim berdiri, seperti *Muslim Council of Britain* (MCB) dan *Muslim Association of Britain* (MAB) di Inggris atau *Australian Federation of Islamic Council* (AFIC) di Australia. Organisasi-organisasi ini memainkan peranan penting dalam rangka memelihara hubungan baik (silaturahmi) di antara sesama komunitas Muslim, serta dalam rangka memperjuangkan kepentingan kaum minoritas Muslim.

Di Inggris dan Australia, pertumbuhan jumlah kaum Muslim tergolong cukup pesat. Bahkan di Inggris, Islam menjadi agama minoritas terbesar (dibanding agama Yahudi atau Hindu). Sementara di Australia, Islam merupakan agama minoritas

terbesar kedua (di bawah agama Hindu/Budha). Sebagai minoritas, kaum Muslim mendapatkan kebebasan dalam hal menjalankan ibadah keagamaannya (salat, puasa maupun pergi haji), namun dalam hal hubungan dengan kaum non-Muslim bisa dikatakan mengalami fluktuasi. Secara umum, hubungan tersebut relatif cukup baik, namun kadangkala muncul perlakuan diskriminatif. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa kendati Inggris dan Australia mengklaim dirinya sebagai “penganut sistem demokrasi”, dalam realitasnya tidak semua warga negara mereka benar-benar menampilkan diri sebagai “demokrat sejati”. Di Australia, kaum Muslim sering menghadapi kesulitan ketika hendak membangun tempat ibadah (khususnya masjid).

Sikap negatif warga mayoritas non-Muslim terhadap kaum minoritas Muslim di kedua negara ini, tidak lepas dari peranan media massa dalam membentuk opini yang dipenuhi prasangka negatif terhadap kaum Muslim. Dalam kasus Salman Rushdie, penulis novel *Ayat-Ayat Setan* yang jelas-jelas menampilkan penghinaan terhadap Islam, misalnya, media massa di Inggris—atas nama “kebebasan berekspresi”—mengambil sikap yang merugikan kaum Muslim. Media juga hampir selalu menampilkan hal-hal yang negatif dalam pemberitaan mereka tentang dunia Islam, yang pada ujungnya ikut membentuk persepsi yang negatif dari kaum non-Muslim terhadap kaum minoritas Muslim. Hal ini dapat dimengerti mengingat

sebagian besar media massa di Inggris dan Australia dikuasai para pemilik modal keturunan Yahudi.

Dari sisi kebijakan resmi, penguasa sendiri memang sering kali menyatakan bahwa semua warga negara di sana, atas nama demokrasi dan hak-hak asasi manusia, diperlakukan secara sama, apa pun agama yang dianut oleh warga negara mereka. Dalam konteks pelaksanaan bidang hukum, misalnya, tidak jarang kaum minoritas Muslim mendapat perlakuan yang sama dengan warga non-Muslim. Tidak jarang, dalam beberapa kasus soal jilbab, kaum minoritas Muslim memperoleh kemenangan di pengadilan.

Akan tetapi, sejak terjadinya kasus serangan teroris di Amerika pada 11 September 2001 (9/11), kecenderungan perlakuan yang sangat diskriminatif tampak ditujukan kepada kaum Muslim. Bahkan, beberapa saat setelah terjadinya kasus 9/11 (juga Bom Bali 2002 dan Bom London 2005), sejumlah masjid di Inggris dan Australia dirusak atau dibakar massa. Beberapa warga Muslim juga mengalami nasib yang mengenaskan, karena dikeroyok massa. Beberapa di antara mereka ada yang sampai meninggal dunia. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa “perang melawan terorisme” yang dikobarkan Amerika Serikat di bawah rezim G.W. Bush, membawa dampak negatif terhadap nasib kaum minoritas Muslim di negara-negara Barat, termasuk di Inggris dan Australia.